



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**KECAMATAN PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 merupakan rangkaian lanjutan pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen Renja ini memuat beberapa hal penting terkait lanjutan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RKPD Perubahan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dokumen ini yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalbalam kota pangkalpinang selama Tahun 2025, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sebagai program dan kegiatan unggulan dalam pelayanan masyarakat di Kota Pangkalpinang umumnya dan masyarakat Pangkalbalam khususnya. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi cerminan atas pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Diakhir penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renja ini dapat direalisasikan dengan baik, benar, penuh tanggungjawab dan menjadi alat penunjuk arah yang tepat bagi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam mengemban tugas memajukan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Mei 2025
CAMAT PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG,



PURNAMAWAN. SE
PEMBINA Tk.I
NIP. 196905031993031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud danTujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	9
2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Catatan-catatan Penting	60
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	61
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel TC 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam Triwulan II Tahun 2024.....	11
Tabel TC 31	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	24
Tabel TC 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024.....	50
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan lanjutan dari tindak lanjut penjabaran Renstra Kecamatan Pangkalbalam Periode 2024 – 2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Perubahan Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan lanjutan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam untuk tahun anggaran 2025. Perubahan Renja merupakan penterjemahan lanjutan pencapaian dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024 – 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

Perubahan Renja ini disusun dengan menyesuaikan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPd Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam tahun 2025 adalah penjabaran pencapaian lanjutan dari Renstra Kecamatan Pangkalbalam 2024 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 yang serta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam berfungsi sebagai pedoman dan rujukan lanjutan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam mempunyai arti strategis dalam pencapaian penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja perangkat daerah merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan lanjutan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan pada tahun 2025.
2. Perubahan Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi lanjutan pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Pangkalbalam untuk tahun terakhir Renstra. Dengan adanya dokumen Perubahan Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian terhadap visi misi pembangunan daerah di bidang pelayanan masyarakat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat uraian detail lanjutan program – program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, sebagai upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan program-program prioritas pembangunan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 meliputi bagian – bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

1.2 landasan hukum

1.3 maksud dan tujuan, dan

1.4 sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam Triwulan I tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan – Catatan Penting

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam triwulan I Tahun 2025.

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam hingga tahun 2025 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkalbalam berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2025 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja Kecamatan Pangkalbalam atau realisasi APBD untuk Kecamatan Pangkalbalam selama 1 triwulan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pangkalbalam ;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:Nilai)	3.7	5,292,270,428	3.710	1,442,393,304		0		0		0	3.71	1,442,393,304	100.27	27.25	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
				Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:Nilai)	71		70.150							70.15			98.80		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1,050,000	92.31	0		0		0		92.31	0	92.31	0.00	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentrangan dan Ketertiban Umum	
3		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	150,000	0	0						0	0	0.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
4		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	150,000	1	0						1	0	50.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
5		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- S K P D (Dengan Satuan:Dokumen)	2	150,000	1	0						1	0	50.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
6		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	150,000	0	0						0	0	0.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
7		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	450,000	3	0						3	0	100.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
8		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4,821,522,148	33.330	1,429,068,304		0		0		0	33.33	1,429,068,304	33.33	29.64	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentrangan dan Ketertiban Umum
9		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	40	4,821,222,148	42	1,429,068,304						42	1,429,068,304	105.00	29.64	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
10		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan	1	150,000	0	0						0	0	0.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						I		II		III		IV		11		12.00		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	150,000	0	0						0	0	0.00	0.00	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
14		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	84,981,700	66.67	9,516,500		0		0	0	67	9,516,500	66.67	11.20	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7,587,000	0	0						0	0	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	35,400,700	1	2,500,000						1	2,500,000	25.00	7.06	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		070101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	16,994,000	1	4,256,500						1	4,256,500	50.00	25.05	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	25,000,000	1	2,760,000						1	2,760,000	100.00	11.04	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	315,906,580	100	7,925,000		0		0	0	100	7,925,000	100.00	2.51	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	33,600,000	1	7,925,000						1	7,925,000	100.00	23.59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	16,750,000	1	9,350,000						1	9,350,000	100.00	55.82	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	265,556,580	1	66,300,624						1	66,300,624	100.00	24.97	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	68,810,000	97.14	5,400,000		0		0	0	0	5,400,000	97.14	7.85	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	68,810,000	3	5,400,000						3	5,400,000	100.00	7.85	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		99.54	27.25	
										PREDIKAT KINERJA				

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						I		II		III		IV		11		12.00			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
28		070102	P R O G R A M PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	474,758,652	100	161,968,349		0		0		0	100	161,968,349	100.00	34.12	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
29		070102201	K o o r d i n a s i Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	0	0												Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
30		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0												Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
31		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	430,756,652	0	161,968,349		0		0		0	161,968,349	0.00	37.60	Seksi Pelayanan Umum	
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:%)	100		100							100		100.00			Lurah Pasir Garam
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:%)	100		100							100		100.00			Lurah Lontong Pancur
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:%)	100		100							100		100.00			Lurah Ketapang
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kelurahan Ampui (Dengan Satuan:%)	100		100							100		100.00			Lurah Ampui
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:%)	100		100							100		100.00			Lurah Rejosari
32		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasiilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	4,000,000	0	0						0	0	0.00	0.00		Seksi Pelayanan Umum

33		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	426,756,652	1	161,968,349						1	161,968,349	100.00	37.95	Lurah Pasir Garam
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1											Lurah Lontong Pancur

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		I		II		III		IV		11		12.00		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1											Lurah Ketapang	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1											Lurah Ampui	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1											Lurah Rejosari	
34		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:%)	100	44,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
35		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2	44,002,000	0	0						0	0	0.00	0.00	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															100.00	34.12			
PREDIKAT KINERJA																			
36	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, (Dengan Satuan:%)	100	2,961,526,768	100.000	0	0	0	0	0	0	100	0	100.00	0.00	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	
				Persentase sarpras publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	80		0							0		0.00		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	
37		070103201	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6,700,000		6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000		100.00		Seksi Pembangunan	
38			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6,700,000	6	6,700,000						6	6,700,000	100.00	100.00	Seksi Pembangunan	
37		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	6,250,000	100	0	0	0	0	0	100	0	100.00	0.00	Seksi Pemberdayaan masyarakat		
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:%)	100		100						100		100.00		Lurah Pasir Garam		

		Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:%)	100		100									100		100.00		Lurah Lontong Pancur
		Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:%)	100		100									100		100.00		Lurah Ketapang
		Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Ampui (Dengan Satuan:%)	100		100									100		100.00		Lurah Ampui

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8		9		10		11		12.00			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:%)	100		100									100		100.00		Lurah Rejosari
40		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	6,250,000	0	0								0	0	0.00	0.00	Seksi Pemberdayaan masyarakat
41		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	2,948,576,768	100	495,962,557		0		0		0	100	495,962,557	100.00	16.82	Seksi Pemberdayaan masyarakat	
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:%)	100		100								100		100.00		Lurah Pasir Garam	
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:%)	100		100								100		100.00		Lurah Lontong Pancur	
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:%)	100		100								100		100.00		Lurah Ketapang	
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan di Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:%)	100		100								100		100.00		Lurah Ampui	
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:%)	100		100								100		100.00		Lurah Rejosari	
42		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6	2,898,576,768	6	491,172,557							6	491,172,557	100.00	16.95	Lurah Lontong Pancur	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	6		6								6		100.00		Lurah Pasir Garam	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

Dievaluasi
 Kota Pangkalpinang, tanggal 10-04-2025
 CAMAT PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG



Pumamawan, SE
 NIP.19690503199303100

Berbeda dengan tahun sebelumnya, evaluasi anggaran dan kinerja untuk penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini hanya sampai dengan triwulan I (Januari – Maret) saja. Hal ini dikarena pelaksanaan pemilu ulang untuk kepala daerah sehingga pelaksanaan perubahan rencana kerja dipercepat. Berdasarkan tabel T.C 29 diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Kecamatan Pangkalbalam hanya sebesar 15,34 persen. Hal ini dikarenakan untuk triwulan I anggaran yang dapat diserap baru hanya untuk pengeluaran rutin saja. Berbeda dengan capaian anggaran, serapan kinerja sudah lebih banyak yaitu sebesar 62,38 persen, dikarenakan target kinerja yang ditetapkan sudah berjalan dari awal tahun. Adapun perincian serapan anggaran dan kinerja sebagai berikut :

1. Serapan anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 27,25 persen, dengan serapan tertinggi di kegiatan administrasi keuangan sebesar 29,64 persen dan yang masih rendah di kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 0 persen. Capaian kinerja program sebesar 95,89 persen untuk indikator indeks kepuasan pelayanan internal kecamatan Pangkalbalam dengan target nilai sebesar 3,65 dan di triwulan II baru mencapai 3,5, sedangkan indikator nilai SAKIP kecamatan Pangkalbalam sudah 100 persen dengan target nilai 71 sudah tercapai dengan nilai 71,75 ditahun 2023. untuk indikator kegiatan yang masih rendah yaitu kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yaitu sebesar 33,33. Ini dikarenakan dari 3 (tiga) laporan yang disusun baru 1 laporan yang terlaksana yaitu penyediaan gaji dan tunjangan asn.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serapan anggarannya sebesar 36,21 persen. Untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan baru terealisasi sebesar 30,35 persen. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar 40,55 persen, sedangkan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang

Dilimpahkan Kepada Camat masih 0 persen dikarenakan baru dilaksanakan di triwulan berikutnya. Capaian kinerja program mencapai 100 persen dengan indikator persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu, yang berarti semua dokumen pelayanan yang dikeluarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pencapaian target kinerja kegiatan yang masih rendah yaitu sebesar 0 persen terdapat di kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat karena belum adanya pelaksanaan kegiatan tersebut di triwulan II.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian serapan anggaran sebesar 38,37 persen. Serapan anggaran tertinggi di kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebesar 11,12 persen. Capaian kinerja program sebesar 100 persen untuk indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif, sedangkan untuk indikator Persentase sarpras publik yang terbangun masih 0 persen. Hal ini terjadi karena belum berjalannya pembangunan di kelurahan dan baru akan dilaksanakan di triwulan berikutnya. Capaian kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100 persen. Begitu juga untuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebesar 100 persen.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian anggaran masih 0 persen begitu juga capaian kinerja. Hal ini terjadi karena belum terlaksananya kegiatan tersebut di triwulan II.

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Renja perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKPD sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut

dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel T.C 2.2 berikut ini :

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kota Pangkalpinang

Perangkat Daerah : Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2025						
KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			Kinerja Program							Kinerja Program			
			(outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan							(outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan			
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN				10,933,159,196		KECAMATAN					10,933,159,196	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,898,104,672	7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,898,104,672
			1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam		Nilai 70					1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam		Nilai 70	
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	1,050,000	7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	1,050,000
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150,000	7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150,000
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	150,000	7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	150,000
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	150,000	7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	150,000
7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	150,000	7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	150,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2025						
KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			Kinerja Program							Kinerja Program			
			(outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan							(outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan			
7 1 1 2.0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	450,000	7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	450,000		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100%	6,283,126,840	7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100%	6,283,126,840		
7 1 1 2.0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	6,282,826,840.10	7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	6,282,826,840.10		
7 1 1 2.0 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	150,000	7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	150,000		
7 1 1 2.0 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	150,000	7 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	150,000		
			2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam	3.70					2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam	3.70			
7 1 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah	100%	118,981,700	7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah	100%	118,981,700		
7 1 1 2.0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	7,587,000	7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	7,587,000		
7 1 1 2.0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,000,000	7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26,000,000		
7 1 1 2.0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	38,400,700	7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	38,400,700		
7 1 1 2.0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,994,000	7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,994,000		
7 1 1 2.0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,000,000	7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,000,000		
7 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	426,136,132	7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan	100%	426,136,132		

7	1	2	2.0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	1 Dokumen	6,831,000	7	1	2	2.0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	1 Dokumen	6,831,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam	100%	4,000,000	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam	100%	4,000,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2025									
KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
			Kinerja Program							Kinerja Program							
			(outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan							(outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan							
7	1	2	2.0	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Laporan	4,000,000	7	1	2	2.0	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Laporan	4,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam	100%	109,376,473	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam	100%	109,376,473
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir garam	1 Laporan	109,376,473	7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir garam	1 Laporan	109,376,473
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang	100%	110,959,773	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang	100%	110,959,773
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Laporan	110,959,773	7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Laporan	110,959,773

7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur	100%	639,580,116	7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur	100%	639,580,116
7	1	3	2.03	1 Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	6 Lembaga Kemasyarakatan	639,580,116	7	1	3	2.03	1 Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	6 Lembaga Kemasyarakatan	639,580,116
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	17,000,000	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	17,000,000
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	17,000,000	7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	17,000,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2025										
KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			LOKASI	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			LOKASI	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
					Kinerja Program								Kinerja Program				
					(outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan								(outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan				
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17,000,000	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	100%	78,550,000	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	100%	78,550,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat	100%	78,550,000	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan	100%	78,550,000

Hasil review menunjukkan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Perubahan RKPD telah mengakomodir Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam walaupun anggaran yang tercantum dalam RKPD lebih dari anggaran renja, ini disebabkan oleh efisiensi anggaran. Namun secara keseluruhan penyusunannya Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 diusulkan untuk melanjutkan kegiatan atau kegiatan yang dibutuhkan demi menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

UNSUR KEWILAYAHAN

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasir Garam)
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ketapang)
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ampui)
5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lontong Pancur)
6. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)

2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Garam
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketapang
4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ampui
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lontong Pancur
6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari
7. Evaluasi Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Garam
2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ketapang
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ampui
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lontong Pancur
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejosari
6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum , dengan sub kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah , dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

TABEL TC 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN						9,015,150,248	10,933,159,196	1,918,008,948	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,503,343,444	6,898,104,672	1,394,761,228	
		Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam	Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam		Nilai 70	Nilai 70				
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	100%	1,050,000	1,050,000	-	
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	150,000	150,000	-	
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	150,000	150,000	-	
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	150,000	150,000	-	
7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	4 Laporan	150,000	150,000	-	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	450,000	450,000	-	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP		100%	100%	5,047,595,164	6,283,126,840.10	1,235,531,676	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5,047,295,164	6,282,826,840.10	1,235,531,676	
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	150,000	150,000	-	
7 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	150,000	150,000	-	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam		3.70	3.70				
1 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah		100%	100%	69,981,700	118,981,700	49,000,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	7,587,000	7,587,000	-	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	-	26,000,000	26,000,000	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	35,400,700	38,400,700	3,000,000	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	16,994,000	16,994,000	-	
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	315,906,580	426,136,132	110,229,552	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	33,600,000	51,300,000	17,700,000	
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	16,750,000	27,450,000	10,700,000	
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	265,556,580	347,386,132	81,829,552	
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik		100%	100%	68,810,000	68,810,000	-	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	3 Unit	68,810,000	68,810,000	-	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)					
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		100 %	100 %	468,053,577	621,377,861	153,324,284	
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan		100 %	100 %	-	6,831,000	6,831,000	
7 1 2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	-	6,831,000	6,831,000	
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam		100 %	100 %	4,000,000	4,000,000	-	
7 1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	-	
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam		100 %	100 %	80,035,701	109,376,473	29,340,772	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah Perubahan (+/-)
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Pasir Garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Pasir Garam		1 Laporan	1 Laporan	80,035,701	109,376,473	29,340,772	7
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang		100 %	100 %	82,761,501	110,959,773	28,198,272	7
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang		1 Laporan	1 Laporan	82,761,501	110,959,773	28,198,272	
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ampui	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ampui		100 %	100 %	79,768,701	103,622,473	23,853,772	
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ampui	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui		1 Laporan	1 Laporan	79,768,701	103,622,473	23,853,772	
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Rejosari	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Rejosari		100 %	100 %	80,161,901	105,515,673	25,353,772	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari		1 Laporan	1 Laporan	80,161,901	105,515,673	25,353,772	
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Lontong Pancur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Lontong Pancur		100%	100%	97,323,773	137,070,469	39,746,696	
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur		1 Laporan	1 Laporan	97,323,773	137,070,469	39,746,696	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan		100%	100%	44,002,000	44,002,000	-	
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan	1 Laporan	44,002,000	44,002,000	-	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2,965,203,227	3,318,126,663	352,923,436	
		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan		80%	80%				

				Pangkal Balam									
KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025							Catatan Penting		
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)						
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa di Kecamatan Pangkal Balam		100%	100%	6,700,000	6,700,000	-				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6 Lembaga	6 Lembaga	6,700,000	6,700,000	-				
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam		100%	100%	6,250,000	12,950,000	6,700,000				
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	6 Lembaga	6,700,000	6,700,000	6,700,000				
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		5 Laporan	5 Laporan	6,250,000	6,250,000	-				
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam		100%	100%							
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Garam	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Garam		100%	100%	525,452,704	590,126,672	64,673,968				
7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	525,452,704	590,126,672	64,673,968				

				Kecamatan	di Kelurahan Lontong Pancur	dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur						
--	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025							Catatan Penting
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)				
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	577,531,212	639,580,116	62,048,904		
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.		5 Laporan	5 Laporan	44,705,075	44,705,075	-		
7 1 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga	2 Lembaga	44,705,075	44,705,075	-		
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti			100%	-	17,000,000	17,000,000		
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan			100%	-	17,000,000	17,000,000		
7 1 4 2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	-	17,000,000	17,000,000		
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam		100%	100%	78,550,000	78,550,000	-		

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025						Catatan Penting
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2025)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2025)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka koordinasi pimpinan	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka koordinasi pimpinan		100%	100%	78.550.000	78.550.000		
7 1 5 2.01 7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	1 Dokumen	78.550.000	78.550.000		

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan-catatan Penting

Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan lanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kota Pangkalpinang untuk pelayanan terhadap masyarakat sekaligus pencapaian visi misi kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Kecamatan Pangkalbalam. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Kecamatan Pangkalbalam sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalbalam, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah yang akan diambil di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Tahun 2025
1	2	3		4
1	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam	100%
2	Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam	100%

4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Pangkalbalam, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.

2. Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman lanjutan dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
3. Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, yang menjadi tolak ukur lanjutan dalam pencapaian target kinerja.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya lanjutan untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam mensukseskan program – program strategis pembangunan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Pangkalpinang Tahun 2024-2026